



**RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD  
TA. 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
JANUARI  
2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2024 ini telah selesai kami susun sesuai dengan harapan.

Prinsip yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun rencana kinerja dilakukan secara terkoordinir, berkesinambungan dan terintegrasi sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Besar harapan pemerintah dan masyarakat agar mengoptimalkan peran dari masing-masing untuk mewujudkan pembangunan pada tahun 2024 yang telah disepakati secara konsensus dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat 2023-2026.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan.

Liwa, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR., M.P.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta OPD .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi OPD...	8
2.4 Review terhadap rancangan awal OPD .....	10
2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat....	11
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD.....</b>	<b>11</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasiona .....	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	13
3.3 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	16
<b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN I</b>	
<b>LAMPIRAN II</b>	
<b>LAMPIRAN III</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengacu pada rencana awal RKPD, Renstra dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya. Masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang tenaga Kerja
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
17. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Tata Ruang wilayah kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat periode 2023 – 2026 dan sebagai bahan landasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja serta target indicator Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara umum melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
2. Mengukur Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.
3. Mengukur tingkat capaian target kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.



## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN I**

#### **LAMPIRAN II**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja OPD ) Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 program, jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 31 Sub-kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Operasional setelah perubahan sebesar Rp 3.796.995.409,- terealisasi sebesar Rp. 3.672.278.173,- atau 97 persen.

Dari seluruh Kegiatan dan Sub kegiatan terdapat 1 Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non perizinan penanaman modal realisasi fisik/output sebesar 82,85% persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2022 dengan capaian strategis sebagai berikut :

Tabel I. Pengukuran Sasaran Strategis TA. 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Jumlah investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 4.042.244.384	Rp. 261.030.787.440
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	IKM	B	B

Berdasarkan table diatas capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum tercapai 100 %.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu idealnya diperlukan adanya indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran / program / kegiatan /sub kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, terus berusaha mewujudkan kemudahan dalam pelayanan perizinan bagi dunia usaha, sehingga memberikan kesempatan yang luas dan transparan kepada masyarakat dalam mengurus segala macam jenis perizinan.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Lampung Barat relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha dan ini harus diimbangi dengan kemudahan-kemudahan prosedur penerbitan izin.

## **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Lampung Barat dimana sebagian besar daerahnya adalah perbukitan / pegunungan dan kawasan maka ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memunculkan ide/inovasi guna menarik para investor agar dapat ikut membantu mengembangkan daerah Kabupaten Lampung Barat, maka dirasa sangat diperlukan dukungan data investasi dan peluang investasi guna memetakan daerah-daerah yang dapat dilirik para investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana berikut :

Pada sisi internal, diantaranya :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Belum ada kendaraan operasional roda empat untuk pelaksanaan survey permohonan perizinan dan pengawasan bersama tim teknis.
3. Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
4. Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
5. Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik Investasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, antara lain :

1. Masih terbatasnya informasi kepada masyarakat di daerah–daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus perizinan, dikarenakan tidak mengetahui cara mengurus proses perizinan secara online, dan masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu yang sulit.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
3. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
4. Belum adanya kebijakan insentif daerah bagi investor.
5. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.

6. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
7. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

- a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelayanan ( Kendaraan Operasional ).

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD**

Hasil review terhadap rancangan awal OPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa kegiatan/ sub kegiatan yang belum terdanai di tahun 2023 diantaranya pengadaan cctv, mesin antrian, alat permainan anak (APE) guna mendukung pelayanan perizinan, maka pada Tahun 2024 sub kegiatan ini diajukan kembali.
- b. Adanya Permendagri 50 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenclatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- c. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada kegiatan musrenbang tahun 2024 terdapat usulan dari Kecamatan Air Hitam yaitu Layanan Perizinan Mobile ( Layanan PM ) dimana usulan kegiatan tersebut tidak dapat diakomodir di DPMPPTSP dikarenakan usulan tersebut pengadaan sarana transportasi untuk BUMDES.

## BAB III

### TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

##### A. Visi dan Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

#### 6 key performance indicator (KPI) BKPM untuk meningkatkan investasi



Eksekusi realisasi investasi besar



Perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha (*Doing Business*)



Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya UMKM di daerah proyek



Penyebaran investasi berkualitas



Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara



Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya UMKM

Sumber: <https://www.bkpm.go.id>

##### B. Peta Arah Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1. Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
2. Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3. Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan SPIPISE atau NSWi (*National Single Window for Investment*) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.
4. Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

Sumber: <https://www.bkpm.go.id>

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal;



Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Table, Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana table berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 M	Rp. 104,64 M	Rp. 109,87 M
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor Perizinan Penanaman modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5

### 3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA dengan kegiatan :**

##### **1. Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- d. Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### **3. Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

Sub. Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

### **4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
- d. Sub. Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub. Kegiatan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub. Kegiatan Jasa Kom, Sumb. Daya Air & Listrik
- c. Sub. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- c. Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- d. Sub. Keg. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

## **II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub. Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - b. Sub. Keg. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

## **III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik;
  - b. Sub. Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko;
  - c. Sub. Kegiatan Pemantauan analisis , evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

## **IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

- 1. **Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**
  - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha
  - b. Sub. Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

## **V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- 1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **VI. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan tahun anggaran 2024  
terlampir

## BAB V

### PENUTUP

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam rencana penetapan kebijakan Anggaran Belanja Daerah Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR.,M.P

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680701 198901 1002



**LAMPIRAN I**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lampung Barat**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/ Subkegiatan(output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%							
2					3	4		5		6		7		8 = 7 / 6x100%		9 = 7		10 = 8		11	12				
02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
02	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		11.147.222.960		3.309.566.950		3.309.566.950					3.309.566.950									
02	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	2	Bidang Urusan	7.315.336.713	2	Bidang Urusan	2.412.316.650	2	Bidang Urusan	2.412.316.650	2	Bidang Urusan	100%	2	Bidang Urusan	2.412.316.650	2	Bidang Urusan	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	Dokumen	48.796.785	11	Dokumen	18.183.000	11	Dokumen	100%	11	Dokumen	100%	11	Dokumen	100%	DPMPTSP			
					Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	20	Dokumen	5		Dokumen	5		Dokumen	5		Dokumen	5			Dokumen					
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	12		Laporan	12		Laporan	12		Laporan	12			Laporan					
02	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	38	Dokumen	6.776.525	11	Dokumen	4.346.000	11	Dokumen	100%	11	Dokumen	100%	11	Dokumen	4.346.000	11	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	3.832.220	1	Dokumen	1.848.100	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1.848.100	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	3.755.289	1	Dokumen	1.811.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1.811.000	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	4	Dokumen	3.374.369	1	Dokumen	1.627.300	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1.627.300	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	3.278.362	1	Dokumen	1.581.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1.581.000	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	20	Laporan	4.084.163	1	Laporan	1.969.600	1	Laporan	100%	1	Laporan	100%	1	Laporan	1.969.600	1	Laporan	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	23.695.857	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	100%	12	Laporan	100%	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	4	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	100%	1	Dokumen	100%	1	Dokumen		1	Dokumen	100%	DPMPTSP



02	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.557.477	2	Paket	2.054.000	2	Paket	2.054.000	2	Paket	100%	2	Paket	2.054.000	2	Paket	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	56.735.640	2	Paket	16.033.400	2	Paket	16.033.400	2	Paket	100%	2	Paket	16.033.400	2	Paket	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	8.500.169	5	Dokumen	4.860.000	5	Dokumen	4.860.000	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	4.860.000	5	Dokumen	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8.877.955	12	Laporan	5.316.000	12	Laporan	5.316.000	12	Laporan	100%	12	Laporan	5.316.000	12	Laporan	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	177.691.968	12	Laporan	47.987.700	12	Laporan	47.987.700	12	Laporan	100%	12	Laporan	47.987.700	12	Laporan	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Jenis	245.500.000	2	Unit	3.600.000	2	Unit	3.600.000	2	Unit	100%	2	Unit	3.600.000	2	Unit	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	56.000.000	2	Unit	3.600.000	2	Unit	3.600.000	2	Unit	100%	2	Unit	3.600.000	2	Unit	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan	100%	12	Laporan		12	Laporan	100%	DPMPTSP	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.990.932.235	12	Laporan	127.450.200	12	Laporan	127.450.200	12	Laporan		12	Laporan	127.450.200	12	Laporan			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan			
02	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.422.372	12	Laporan	1.625.000	12	Laporan	1.625.000	12	Laporan	100%	12	Laporan	1.625.000	12	Laporan	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.725.492.251	12	Laporan	22.560.000	12	Laporan	22.560.000	12	Laporan	100%	12	Laporan	22.560.000	12	Laporan	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	263.017.612	12	Laporan	103.265.200	12	Laporan	103.265.200	12	Laporan	100%	12	Laporan	103.265.200	12	Laporan	100%	DPMPTSP	
02	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit	100%	1	Unit		1	Unit	100%	DPMPTSP	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	354.187.404	11	Unit	120.747.250	11	Unit	120.747.250	11	Unit		11	Unit	120.747.250	11	Unit			

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		10	Unit		10	Unit		10	Unit		10	Unit					
02	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	219.626.517	11	Unit	103.350.000	11	Unit	103.350.000	11	Unit	100%	11	Unit	103.350.000	11	Unit	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	20.754.012	10	Unit	7.160.000	10	Unit	7.160.000	10	Unit	100%	10	Unit	7.160.000	10	Unit	100%	DPMPTSP
02	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	98.856.875	1	Unit	10.237.250	1	Unit	10.237.250	1	Unit	100%	1	Unit	10.237.250	1	Unit	100%	DPMPTSP
02	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	20	%	2.505.800.000	10	%	350.000.000	10	%	350.000.000	10	%	100%	10	%	350.000.000	10	%	100%	DPMPTSP
02	18	03	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	2.505.800.000	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	4	Dokumen	2.395.800.000	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	350.000.000	1	Dokumen	100%	DPMPTSP
02	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	100	%	637.259.240	100	%	95.850.300	100	%	95.850.300	100	%	100%	100	%	95.850.300	100	%	100%	DPMPTSP
02	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2420	Pelaku Usaha	637.259.240	400	Pelaku Usaha	95.850.300	400	Pelaku Usaha	95.850.300	400	Pelaku Usaha	100%	400	Pelaku Usaha	95.850.300	400	Pelaku Usaha	100%	DPMPTSP
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Penanaman Modal	75	Kegiatan Usaha		30	Kegiatan Usaha		30	Kegiatan Usaha		30	Kegiatan Usaha		30	Kegiatan Usaha		30	Kegiatan Usaha		
02	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2420	Pelaku Usaha	429.804.790	400	Pelaku Usaha	62.265.300	400	Pelaku Usaha	62.265.300	400	Pelaku Usaha	100%	400	Pelaku Usaha	62.265.300	400	Pelaku Usaha	100%	DPMPTSP

02	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Penanaman Modal	75	Kegiatan Usaha	97.915.000	30	Kegiatan Usaha	33.585.000	30	Kegiatan Usaha	33.585.000	30	Kegiatan Usaha	100%	30	Kegiatan Usaha	33.585.000	30	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP
02	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75	%	460.522.007	75	%	417.400.000	75	%	417.400.000	75	%	100%	75	%	417.400.000	75	%	100%	DPMPTSP
02	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	Kegiatan Usaha		8	Kegiatan Usaha		8	Kegiatan Usaha		8	Kegiatan Usaha	100%	8	Kegiatan Usaha		8	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500	Pelaku Usaha	460.522.007	500	Pelaku Usaha	417.400.000	500	Pelaku Usaha	417.400.000	500	Pelaku Usaha		500	Pelaku Usaha	417.400.000	500	Pelaku Usaha		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	13	Kegiatan Usaha		13	Kegiatan Usaha		13	Kegiatan Usaha		13	Kegiatan Usaha		13	Kegiatan Usaha		13	Kegiatan Usaha		
02	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	10	Kegiatan Usaha	64.287.300	8	Kegiatan Usaha	52.724.000	8	Kegiatan Usaha	52.724.000	8	Kegiatan Usaha	100%	8	Kegiatan Usaha	52.724.000	8	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP
02	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	500	Pelaku Usaha	288.590.082	500	Pelaku Usaha	303.546.000	500	Pelaku Usaha	303.546.000	500	Pelaku Usaha	100%	500	Pelaku Usaha	303.546.000	500	Pelaku Usaha	100%	DPMPTSP
02	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	13	Kegiatan Usaha	107.644.625	13	Kegiatan Usaha	61.130.000	13	Kegiatan Usaha	61.130.000	13	Kegiatan Usaha	100%	13	Kegiatan Usaha	61.130.000	13	Kegiatan Usaha	100%	DPMPTSP
02	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPTSP	100	%	78.305.000	100	%	34.000.000	100	%	34.000.000	100	%	100%	100	%	34.000.000	100	%	100%	DPMPTSP

02	18	06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Dokumen	78.305.000	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	100%	DPMPPTSP	
02	18	06	2,01	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	78.305.000	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	34.000.000	1	Dokumen	100%	DPMPPTSP	

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.430.628.960,00							9.229.562.204,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.430.628.960,00							9.229.562.204,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP (%)				79.00	2.617.972.260,00				4. Reformasi Birokrasi			6.131.349.784,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.729.000,00				4. Reformasi Birokrasi			40.663.987,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				8		(Balik Bukit, Balik Bukit)				11			
			Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (Dokumen)				5		(Balik Bukit, Balik Bukit)				5			
			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				12		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			5.647.104,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		4.00	11.00	8.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				11.00			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS,PPAS Perubahan) (Dokumen)				8	4.700.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur				
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.193.517,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		4.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				1.00			
			Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 dokumen (Dokumen)				1	2.340.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur				
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.095.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.129.408,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1.00	0.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				1.00			
			Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen (Dokumen)				1	2.095.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur				
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.135.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.811.974,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				1.00			
			Penyusunan Dokumen DPA sebanyak 1 Dokumen (Dokumen)				1	2.135.000,00	(Balik BUKit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.18.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.731.968,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1.00	0.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	1.00			
			Penyusunan Dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen (Dokumen)				1	2.010.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Aparatur				
2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.255.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.403.469,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4.00	4.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	1.00			
			Penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen (Laporan)				1	2.255.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Aparatur				
2.18.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.194.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur		19.746.547,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		10.00	10.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	12.00			
			Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKPJ,LPPD, Evaluasi Renja Triwulan I, II,III,IV, Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I,II,III,IV dan LKIP ) (Laporan)				12	10.194.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Aparatur				
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.134.083.460,00				4. Reformasi Birokrasi			3.819.390.115,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				22		(Balik Bukit, Balik Bukit)						28			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)						1			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				17		(Balik Bukit, Balik Bukit)						17			
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.124.936.860,00							3.811.024.543,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		24.00	26.00	22.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)						28.00			
			Pelaksanaan pembayaran gaji dan pegawai sebanyak 27 Orang (Orang)				22	2.124.936.860,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Aparatur				
2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.802.187,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)					Aparatur	1.00			
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan (Laporan)				1	2.750.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Aparatur				



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.18.01.2.02.0007      2.18.01.2.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							4.196.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	17	1.521.635,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1.00	1.00	17.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
		Penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 1 laporan (Laporan)				17	4.196.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								2.200.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1.00	3.041.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
		Penyusunan laporan prognosis sebanyak 1 laporan (Dokumen)				1	2.200.100,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
2.18.01.2.03   2.18.01.2.03.0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7.073.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	0	8.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								7.073.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1	8.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
		Penyusunan laporan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD sebanyak 1 dokumen (Dokumen)					1	7.073.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2.18.01.2.05     2.18.01.2.05.0005   2.18.01.2.05.0009	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							24.328.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1	23.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				4		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								4.328.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	1	5.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)									
			Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 dokumen (Dokumen)					1	4.328.900,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur	4	18.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0	4	4		(Balik Bukit, Balik Bukit)										
	Pelaksanaan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi sebanyak 4 orang (Orang)				4	20.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							151.728.700,00				4. Reformasi Birokrasi			213.561.212,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
											NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1		(Balik Bukit, Balik Bukit)						1			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				6		(Balik Bukit, Balik Bukit)								5	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamuh (Laporan)				12		(Balik Bukit, Balik Bukit)								12	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				12		(Balik Bukit, Balik Bukit)								12	
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2.678.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			3.093.459,00			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		7.00	10.00	2.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)							1.00		
			Penyediaan paket komponen instalasi listrik sebanyak 2 paket (Paket)				2	2.678.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur						
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						16.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		47.279.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		8.00	8.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)							1		
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket (Paket)				1	16.510.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur						
2.18.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamuh						5.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.391.452,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		5.00	5.00	6.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)							5.00		
			Penyediaan bahan bacaan /SKHU sebanyak 5 SKHU (Dokumen)				6	5.760.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		aparatur						
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		7.719.961,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamuh (Laporan)		12.00	12.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)							12		
			Penyediaan makan minum tamu selama 12 bulan (Laporan)				12	5.500.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur						
2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.280.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		148.076.640,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		29.00	12.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)							12		
			Pelaksanaan Perjalanan Dinas Selama 12 Bulan (Laporan)				12	121.280.700,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur						
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					23.150.000,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (Unit)				9		(Way Mengaku, Balik Bukit)					4				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	4. Reformasi Birokrasi				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0	0										
		Pengadaan Laptop ; Pemadam Api Perkantoran; Permainan-Anak untuk Penunjang Pelayanan Publik (Unit)					9	23.150.000,00	(Way Mengaku, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Aparatur dan Masyarakat				
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.169.200,00							1.731.245.423,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					12		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan (Laporan)					12		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)					12		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			2.106.411,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			1378.00	1027.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
		Penyediaan Surat Masuk dan Surat Keluar (Laporan)					12	1.725.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		aparatur				
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		1.500.428.045,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			4.00	4.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
		Pembayaran jasa listrik, telfon, air dan internet kantor (Laporan)					12	22.560.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		aparatur				
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						106.884.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	aparatur		228.710.967,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			3.00	4.00	12.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				12			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum untuk 3 sub bidang urusan (Laporan)					12	106.884.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		aparatur				
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.710.000,00				4. Reformasi Birokrasi			294.989.047,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					11		(Balik Bukit, Balik Bukit)				11			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)					11		(Balik Bukit, Balik Bukit)				9			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (Unit)					1		(Balik Bukit, Balik Bukit)				2			
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						103.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			190.979.580,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			11.00	0.00	11.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				11.00			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 2 unit mobil dan 9 unit motor (Unit)				11	103.350.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)						7.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		18.046.967,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Genset (Unit)					11	7.910.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)							9.450.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		85.962.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Gedung kantor sebanyak 2 unit (Unit)						1	9.450.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur		
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi (%)				15	1.900.000.000,00				4. Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.178.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal (Dokumen)				3	1.900.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			4. Reformasi Birokrasi			2.178.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)				3.00	1.900.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Reformasi Birokrasi			2.178.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pelaksanaan Promosi sebanyak 3 Kali yaitu : promosi investasi dalam provinsi Rp 727.912.000, Promosi Investasi Dalam Daerah Rp 868.298.000, dan expo Rp 300.290.000 (Dokumen)						3	1.900.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat, Investor dan Calon Investor			
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit sesuai dengan standar layanan (%)				100	498.060.000,00				4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Investor dan Calon Investor		483.899.050,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)				2000	498.060.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			4. Reformasi Birokrasi			483.899.050,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Kegiatan Usaha)						65		(Balik Bukit, Balik Bukit)					70	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha) (Orang)				150		(Balik Bukit, Balik Bukit)					165		
								398.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi			363.485.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		2377.00	400.00	2000		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2200		
			Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 3 aspek yaitu Pelayanan Perizinan Rp 186.453.000, Mall Pelayanan Publik (MPP) Rp 90.143.000, dan Forum Konsultasi Publik Rp 122.004.000 (Pelaku Usaha)				2.000	398.600.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat			
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						25.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	masyarakat		31.399.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		4.00	20.00	150		(Balik Bukit, Balik Bukit)				masyarakat	165		
			Pelaksanaan Pelayanan konsultasi /pengaduan baik secara online maupun langsung sebanyak 150 pelaku usaha (Pelaku Usaha)				150	25.700.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat			
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						73.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	masyarakat		89.013.650,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		58.00	60.00	65		(Balik Bukit, Balik Bukit)				masyarakat	70.00		
			Pelaksanaan survey perizinan terhadap pelaku usaha sebanyak 65 Kegiatan usaha (Kegiatan Usaha)				65	73.760.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat			
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan tahun N-1 (%)				85	380.596.700,00				4. Reformasi Birokrasi			360.213.370,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						380.596.700,00				4. Reformasi Birokrasi			360.213.370,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal (Kegiatan Usaha)				0		(Balik Bukit, Balik Bukit)					10		
			Jumlah Pelaku usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha)				210		(Balik Bukit, Balik Bukit)					210		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)				14		(Balik Bukit, Balik Bukit)					15		
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		210.00	210.00	210.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat, Investor dan Calon Investor	210.00	262.354.620,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanaman Modal terhadap 210 Pelaku usaha ( Rp. 286.950.400,-) serta penyelesaian permasalahan dan hambatan terhadap 6 kegiatan usaha ( Rp. 73.133.300,-) (Pelaku Usaha)				210	360.083.700,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		26.00	13.00	14.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata	Masyarakat, Investor dan Calon Investor	15.00	97.858.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal serta evaluasi terhadap 14 Kegiatan Usaha (Kegiatan Usaha)				14	20.513.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase layanan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMPSTSP (%)				100	34.000.000,00				4. Reformasi Birokrasi	Masyarakat, Investor dan Calon Investor		76.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Investasi dan Realisasi Perizinan (Dokumen)				1	34.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			4. Reformasi Birokrasi		1	76.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		45.00	1.00	1.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan Sektor Pariwisata		1.00	76.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1 Buku/dokumen (Dokumen)				1	34.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Investor dan Calon Investor			

	JUMLAH	5.430.628.960,00		9.229.562.204,00	
--	--------	------------------	--	------------------	--